

**PENGELOMPOKAN ZIS, APBN, DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN
BERDASARKAN PROVINSI DI INDONESIA MENGGUNAKAN
KOHONEN SELF ORGANIZING MAPS (SOM)**

(Studi Kasus: Dana ZIS, Jumlah Muzakki, APBN, dan Empat Indikator
Kesejahteraan Tahun 2016)

Baiq Rina Ary Widiarni
Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia

INTISARI

Undang – Undang Dasar 1945, secara eksplisit mengamatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah daerah adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Selain idikator Kesejahteraan, perencanaan pembangunan nasional negara memiliki pertimbangan dari berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah. Zakat memiliki kekuatan distribusi pendapatan terutama dalam penciptaan keadilan dan kesejahteraan social. potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tercatat, pada 2010 sekitar Rp 217 trilion terus meningkat pesat di 2016 mencapai Rp 286 triliun. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2016 dalam perkembangannya menurut target pencapaian yang dimiliki pemerintah diantaranya kemiskinan sebesar 9,0-10 persen atau turun dari 2015 yang dipatok 10,3 persen. Adapun rasio gini dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan sebesar 0,4 dan 69,4 Pada 2015, gini rasio dan IPM adalah 0,39 dan 70,1 persen. pada tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,2-5,5 persen. Dalam upaya mencapai target pembangunan nasional secara maksimal, perlu dilakukan pengelompokkan beberapa indikator penunjang. Peneliti menggunakan data penunjang seperti: 1) Dana ZIS, 2) Jumlah Muzakki, 3) Penerimaan Pendapatan, 4) Penerimaan pembiayaan 5)Pengeluaran belanja, 6) Pengeluaran pembiayaan, 7) Kemiskinan , 8) Gini Rasio, 9) Pengangguran 10) Indeks Pembangunan Manusia. Metode yang digunakan adalah Kohonen Self Organizing Maps (SOM). SOM merupakan perangkat visualisasi dan analisis untuk data berdimensi tinggi dan dalam pengelompokannya tidak memerlukan uji asumsi. Berdasarkan grafik WCSS ditentukan jumlah cluster sebanyak 7 dengan sepuluh provinsi berada pada Cluster 1, tiga belas Provinsi berada pada cluster 2, empat provinsi ada pada cluster 3, tiga Provinsi ada pada cluster 4, sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Provisi Jawa Timur berada pada cluster 5, Provinsi DKI Jakarta berada Cluster 6, Provinsi Jawa Barat sebagai cluster 7.

Kata kunci: ZIS, APBN, Indikator Kesejahteraan, Cluster, Self Organizing Maps (SOM).

